

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut paham Neorealisme, setiap tindakan, aktivitas, kepentingan, serta kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara adalah karena adanya pengaruh dari sistem internasional yang sedang terjadi saat itu. Sistem internasional mempengaruhi suatu negara berperilaku dan bertindak, termasuk dalam merumuskan dan membuat kebijakan luar negerinya tersebut. Kebijakan luar negeri dibuat oleh suatu negara untuk mencapai suatu kepentingan yang dipengaruhi oleh sistem internasional tadi.¹ Seperti yang dikatakan Waltz:

“Kepentingan para penguasa, dan kemudian negara, membuat suatu rangkaian tindakan; kebutuhan kebijakan muncul dari persaingan negara yang diatur; kalkulasi yang berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan ini dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang akan menjalankan dengan baik kepentingan-kepentingan negara; keberhasilan adalah ujian terakhir dari kebijakan itu, dan keberhasilan didefinisikan sebagai memelihara dan memperkuat negara. Hambatan-hambatan struktural pada sistem menjelaskan mengapa metode-metode tersebut digunakan berulang kali disamping perbedaan-perbedaan dalam diri manusia dan negaranegara yang menggunakannya.”²

Sama halnya dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) pada masa Presiden Barrack Obama, dimana fokus kebijakan luar negeri AS berubah haluan dari Timur Tengah ke Asia Pasifik, dimana perubahan ini dikarenakan dipengaruhi oleh sistem internasional, kondisi, serta dinamika yang sedang terjadi di Asia Pasifik.³ Asia Pasifik merupakan bagian dari fokus utama AS

¹ Kenneth Waltz, *Foreign Policy and Democratic Politics: The American and British Experience*, (1967).

² *Ibid*

³ Diakses dari <http://www.foreignpolicyi.org/content/obama-administrations-pivot-asia> pada 14 Maret 2016 pukul 08.24 WIB.

di bidang politik, ekonomi, serta militer⁴ dalam sebuah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh AS yaitu “*The Pivot to Asia*”, yang menandakan perubahan prioritas kebijakan luar negeri AS dari Timur Tengah ke Asia Pasifik tadi.⁵

Dalam sebuah dokumen yang diterbitkan Departemen Pertahanan AS, disebutkan dengan jelas bahwa AS merubah prioritas menuju kawasan Asia Pasifik:

*“...accordingly, while the U.S. military will continue to contribute to security globally, we will of necessity ‘rebalance’ toward the Asia-Pacific regions. Our relationship with Asian allies and key partners are critical to the future stability and growth of the region.”*⁶

Pivot to Asia merupakan sebuah strategi yang dilakukan tidak terbatas berdasarkan untuk mencapai kepentingan militer, tetapi juga ekonomi, sosial, politik, serta diplomasi, walaupun faktor utama yang menyebabkannya adalah memang faktor keamanan.⁷ Kemudian juga, dalam sebuah pidatonya Presiden Obama menyebutkan bahwa Asia Pasifik merupakan suatu kawasan yang penting bagi AS :

*“Here, we see the future. As the world’s fastest-growing region—and home to more than half the global economy—the Asia Pacific is critical to achieving my highest priority: creating jobs and opportunity for the American people. With most of the world’s nuclear powers and some half of humanity, Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering or human progress.”*⁸

Menurut pernyataan Presiden Obama diatas, kawasan Asia Pasifik adalah sebagai sebuah kawasan yang akan menentukan masa depan dunia, kawasan yang

⁴ Ralph A. Cossa, *The U.S Asia-Pacific Security Strategy for the Twenty-First Century*, (New York: M.E. Sharpe & An East Gate Book).

⁵ Adam Quinn, *US Pivot To Asia Between Continuity And Change*, Assignment Coversheet, (University of Birmingham, 2013), hal. 1

⁶ Departemen Pertahanan AS, *Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense*, (Januari 2012), hal 2.

⁷ Adam Quinn, *op.cit.* hal. 1

⁸ *Remarks By President Obama to the Australian Parliament*, The White House – Office of the Press Secretary, diakses dari <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-presidentobama-australian-parliament>.

akan menentukan apakah dunia akan menjadi sebuah tempat yang dipenuhi konflik atau hubungan-hubungan kerjasama, sebuah kawasan dimana setengah dari populasi dunia berada disana dan dimana dinamika serta kecamuk aktivitas kekuatan nuklir sering terjadi, dan tentunya terutama sebagai sebuah kawasan yang menjadi prioritas tinggi bagi perwujudan kepentingan AS.

Salah satu faktor alasan AS merubah fokus kebijakan luar negerinya adalah karena mahalnya biaya yang dikeluarkan dan diakibatkan oleh invasi ke Timur Tengah yaitu invasi yang dilakukan ke Afghanistan dan Irak.⁹ Selain itu kebijakan ini juga didasari dari latar belakang Presiden Obama yang berasal dari Partai Demokrat yang lebih bersifat ‘damai’ dan menggunakan *soft power* serta lebih mengandalkan kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional.¹⁰ Berbeda dengan presiden sebelumnya, George W. Bush yang berasal dari Partai Republik yang lebih bersifat konservatif dan lebih mengandalkan *hard power* serta kekuatan militer demi mencapai kepentingan nasional, tercermin dari kebijakan *War on Terror* Presiden Bush yang melakukan invasi ke Timur Tengah.¹¹

Selain itu, AS mewujudkan *Pivot to Asia* dengan terus melakukan pendekatan kepada negara-negara aliansinya di Asia Pasifik, melalui kunjungan kenegaraan dan kerjasama-kerjasama di berbagai bidang, terutama keamanan dan militer.¹² AS adalah sebuah negara pemenang Perang Dunia II dan berhasil menguasai separuh dari kawasan Asia Pasifik ditandai dengan terjalinnya aliansi antara negara-negara

⁹ Willian Moraes Roberto, João Arthur da Silva Reis, *Disengagement from the Middle East and the Pivot to Asia: An Assessment of Changes within US Grand Strategy between 2003 and 2014*, (Federal University of Rio Grande do Sul).

¹⁰ Beck, Paul Allen dan Frank J.Sorauf, *Party Politics in America*, (USA : HarperCollins Publisher, 1992).

¹¹ *Ibid*

¹² Charles Abeyawardena, *American Retrenchment and the Asia Balance of Power*, (TROY University, 2014), hal. 9

di sekitarnya seperti Thailand, Filipina, Singapura dan Australia, serta khususnya dengan negara-negara di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan yang masih berlanjut hingga sekarang.¹³

Dalam implementasinya, kebijakan militer AS cenderung difokuskan ke kawasan Asia Timur, wilayah di mana Tiongkok dan Korea Utara menjadi ancaman.¹⁴ Asia Timur adalah salah satu kawasan regional di benua Asia yang memiliki luas sekitar 6.640.000 km² atau merupakan 15 persen dari keseluruhan wilayah benua Asia, dimana kawasan ini telah menjadi sebuah kawasan yang sangat dinamis sejak lama termasuk ketika Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet masih berlangsung.¹⁵ Dalam pandangan AS, kawasan Asia Timur sama pentingnya dengan kawasan Eropa dan kawasan lain seperti kawasan Timur Tengah dan merupakan salah satu kawasan yang akan dijadikan fokus pelaksanaan dari *Pivot to Asia*.¹⁶

Sejak pasca Perang Dunia II, AS telah melalui banyak bentuk hubungan diplomatik, terutama kerjasama militer dengan negara-negara Asia Timur.¹⁷ Jepang telah menerima perlindungan secara militer dari AS, dan AS telah mendirikan pusat-pusat pertahanannya di Jepang. Kerjasama militer antara AS dan Jepang telah menjadi upaya dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Timur, karena dengan berkembangnya kekuatan militer Tiongkok, masalah konflik Semenanjung Korea

¹³ *Remarks By President Obama to the Australian Parliament*, The White House – Office of the Press Secretary, diakses dari <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-presidentobama-australian-parliament>

¹⁴ Departemen Pertahanan AS, *Document of Army Strategic Planning Guidance 2012*

¹⁵ Adi Joko Purwanto, “Peningkatan Anggaran Militer Cina Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Di Asia Timur”, *Spektrum*, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 7, No. 1 (Juni, 2010): hal. 2

¹⁶ Bonnie S. Glaser, *Pivot to Asia: Prepare for Unintended Consequences*, hal 23

¹⁷ D. Bradley Gibbs, *Future Relations Between The United States And Japan : Article 9 And The Remilitarization of Japan*.

dan beberapa masalah sengketa wilayah membuat kawasan ini rentan dengan konflik.¹⁸ Presiden Barack Obama bahkan dengan yakin menegaskan bahwa kestabilan dan konflik yang masih bisa ditahan di Asia Timur pasca Perang Dunia II adalah karena pengaruh dari AS dan aliansinya dengan Jepang.¹⁹

Kondisi keamanan di Asia Timur beberapa dekade ini semakin panas dan tidak stabil, terutama karena peningkatan perangkat dan anggaran militer Tiongkok yang terus naik tanpa transparansi, serta ancaman dari kepemilikan nuklir dan misil antar benua (*Inter-Continental Ballistic Missile/ICBM*) Korea Utara.²⁰ Dari sejarah yang berkembang dalam kawasan ini, masalah ketegangan politik serta berbagai macam konflik wilayah antar negara di kawasan Asia Timur merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi. Khususnya rivalitas tiga negara kuat dalam kawasan ini yaitu Tiongkok, Jepang dan Korea Utara.²¹

Korea Utara, dianggap mempunyai ancaman dalam jangka pendek dengan perkembangan misil balistik dan uji coba nuklirnya, sedangkan Tiongkok memiliki ancaman dalam jangka panjang di tengah peningkatan postur pertahanannya, baik dilihat dari anggaran pertahanannya maupun modernisasi terhadap angkatan militer yang dimilikinya yang dianggap kurang transparan. Dalam hal jumlah personil angkatan perangnya, KPA (*Korean People's Army*) menduduki urutan keempat di dunia setelah Tiongkok, AS dan India, dengan jumlah sekitar 1.020.000

¹⁸ Gregory J. Moore, "How North Korea Threatens Tiongkok's Interests: Understanding Chinese duplicity' on the North Korean Nuclear Issue", *International Relations of the Asia Pacific*, Vol. 8.

¹⁹ D. Bradley Gibbs, *loc.cit.*, hal. 166

²⁰ Ralph A. Cossa, *The U.S Asia-Pacific Security Strategy for the Twenty-First Century*, (New York: M.E. Sharpe & An East Gate Book, 2000).

²¹ *Ibid.*

personel aktif, dan sekitar 600.000 personel cadangan. Angkatan daratnya memiliki alutsista utama yang terdiri dari sekitar 3.500 unit.²²

Uji coba peluncuran misil balistik yang telah empat kali dilakukan Korea Utara sejak 2006-2016 semakin mempertegas kekhawatiran mengenai program misil Korea Utara dan kemampuannya untuk menghantarkan senjata pemusnah masal.²³ Korea Utara telah memiliki sistem misil jarak pendek dan jarak jauh yang dapat menghantarkan senjata konvensional, kimia, nuklir, dan kemungkinan senjata biologis. Walaupun Korea Utara belum pernah mendemonstrasikan kemampuannya untuk menghantarkan senjata nuklir dengan misil balistik jarak jauh, namun diduga kuat mereka telah dapat mempersenjatai misil jarak menengah *Nodong* dan misil jarak jauh *Taepodong* dengan hulu ledak nuklir yang dapat mencapai keseluruhan wilayah Asia serta wilayah Rusia, Alaska dan bagian utara Australia yang dapat ditembakkan kapanpun.²⁴

Selain ancaman kepemilikan misil balistik yang semakin meningkat dari Korea Utara, ancaman serupa juga datang dari Tiongkok, negara lain yang dianggap menjadi ancaman bagi keamanan Asia Timur. Tiongkok dianggap memiliki ancaman dalam jangka panjang di tengah peningkatan postur pertahanannya, baik dilihat dari anggaran pertahanannya maupun modernisasi terhadap angkatan militer yang dimilikinya yang dianggap kurang transparan.²⁵ Hal tersebut pernah ditunjukkan Tiongkok dengan memasang postur misilnya yang dihadapkan pada

²² *Military Balance 2002-2011*, The International Institute for Strategic Studies, (London: Taylor&Francis, 2002-2011).

²³ Center for Nonproliferation Studies, *CNS Special Report on North Korean Ballistic Missile Capabilities*, (Monterey Institute of International Studies, 2006).

²⁴ *Ibid*

²⁵ Epica Mustika Putro, *Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang*, (Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hal. 81.

Taiwan yang memicu krisis Selat Taiwan yang sempat mempertegang kondisi keamanan di kawasan, yang membuat situasi di Asia Timur semakin tidak kondusif dan meragukan inisiatif Tiongkok dalam menjaga keamanan.²⁶

Tiongkok juga memperlihatkan tindakan ancaman lain yaitu pada sengketa Kepulauan Senkaku dan Laut Cina Selatan pada tahun 2006, Tiongkok yang mendapatkan tekanan untuk menghentikan pembangunan pipa gas di Kepulauan Senkaku dari Jepang tetap menolak dan mengancam akan menyerang negara yang menentang keputusannya yang membuatnya dengan Jepang semakin panas.²⁷ Sikap Tiongkok ini mendapat protes dari Jepang ketika pertemuan “*China - Japan Sea of Peace Cooperation and Friendship*” pada Desember 2007. Pada pertemuan tersebut kedua negara tidak menemukan kesepakatan konkrit masalah konflik ini, karena Tiongkok menolak menghentikan aktivitas pembangunan jalur pipa gas di sekitar Kepulauan Senkaku dan mengancam akan menyerang negara yang menentang kebijakan ini.²⁸ Kemudian pada bulan Juli 2007, terjadi tindakan agresif militer Tiongkok pada sengketa Laut Cina Selatan. Kapal Angkatan Laut Tiongkok menembaki sebuah kapal nelayan Vietnam kemudian menewaskan seorang pelaut di sekitar Kepulauan Paracel, insiden ini membuat konflik Laut Cina Selatan memanas²⁹. Melihat kondisi keamanan di Asia Timur semakin tidak stabil, dibutuhkan kehadiran AS kerjasama militer dengan negara-negara partner demi

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hesti Karismaya, *Manajemen Konflik Jepang-Cina dalam Mengatasi Sengketa Kepulauan Senkaku*. Journal Ilmu Hubungan Internasional, Mei Vol 127, (Tesis, Universitas Mulawarman, 2013)

²⁸ *Ibid.*

²⁹ The Straits Times. www.straitstimes.com diakses pada 30 November 2015

menjaga kepentingan di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan, Taiwan, terutama Jepang sebagai sekutu yang penting dan paling kuat pada kawasan ini.³⁰

1.2. Rumusan Masalah

Pivot to Asia merupakan kebijakan luar negeri AS yang berubah haluan dari Timur Tengah ke Asia Pasifik. Salah satu faktor pendorong AS merubah kebijakan luar negerinya adalah karena meningkatkannya kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara serta konflik berkepanjangan di Asia Timur. Tiongkok dan Korea Utara adalah ancaman paling besar di kawasan Asia Timur. Jika dibandingkan dengan sekutu AS di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, keamanan dan pertahanannya masih dinilai memerlukan perubahan untuk menghadapi kekuatan Tiongkok dan Korea Utara.

AS mempunyai kepentingan di kawasan ini, yang dimana jika tidak dilakukan *Pivot to Asia* maka dapat mengancam AS untuk mencapai kepentingannya. Untuk mencapai kepentingan tersebut, dibutuhkan strategi tertentu yang harus dilancarkan oleh AS agar kebijakan *Pivot to Asia* dapat dijalankan dengan baik.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Penulis melakukan penelitian untuk menjawab akan pertanyaan penelitian sebagai berikut **“Bagaimana strategi Amerika Serikat dalam Menjalankan *Pivot to Asia* Di Kawasan Asia Timur?”**

³⁰ Avery Emma & Rinehart Ian E. *U.S – Japan Alliance*. Congressional Research Service, (Desember 2013), hal 5.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana strategi AS dalam menjalankan *Pivot to Asia* di kawasan Asia Timur.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara akademis adalah menjelaskan pengetahuan tentang konsep *extended deterrence* dalam lingkup sistem internasional.
2. Secara praktis dalam Hubungan Internasional, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang dinamika hubungan AS dengan negara-negara aliansinya dan dinamika konflik di Asia Timur.

1.6. Tinjauan Pustaka

Berbagai buku, jurnal, karya ilmiah, artikel atau tulisan-tulisan mengenai kebijakan luar negeri AS telah banyak ditulis dan dipublikasikan, dengan berbagai perspektif dan landasan yang beragam. Hal ini menunjukkan AS sebagai salah satu negara besar yang mempunyai pengaruh yang penting dalam kancah hubungan internasional. Tinjauan pustaka ini sendiri bertujuan untuk membahas beberapa tulisan-tulisan dan publikasi tersebut yang penulis gunakan sebagai referensi dalam menulis penelitian.

Sumber pustaka pertama yang penulis adalah sebuah dokumen resmi “*Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense*” (2012), diterbitkan oleh Pemerintahan AS yang disetujui oleh Presiden Obama dan *Secretary of Defense* Leon E. Panetta. Diterbitkannya dokumen ini menandai

berakhirnya invasi AS di Timur Tengah dan dicanangkannya kebijakan luar negeri AS yang baru yaitu *Pivot to Asia*. Dalam dokumen ini disebutkan perubahan poros kebijakan luar negeri AS dari Timur Tengah ke Asia Pasifik, dan menyebut Asia Pasifik sebagai suatu kawasan yang penting bagi masa depan perpolitikan AS dan mencapai kepentingan luar negerinya. Dalam dokumen ini juga berisi pernyataan-pernyataan resmi bahwa AS telah berhasil memberantas ancaman yang berada di Timur Tengah seperti Al-Qaeda dan Pemerintahan Taliban. Dalam dokumen ini juga disebutkan bahwa Tiongkok dan Korea Utara adalah ‘musuh yang baru’ bagi AS karena menyebabkan ancaman keamanan di wilayah Asia Timur dan dapat menghambat AS dalam mencapai kepentingannya di kawasan ini. Perbedaan dokumen ini dengan skripsi yang dibuat peneliti adalah; dalam dokumen ini dikatakan tujuan *Pivot to Asia* adalah untuk menanamkan pengaruh dan menangkal ancaman di Asia Pasifik, tapi tidak dikatakan secara rinci dan detail penanaman pengaruh yang seperti apa dan bagaimana melakukan *Pivot to Asia* tersebut.

Sumber pustaka selanjutnya dalam penelitian ini adalah sebuah jurnal tulisan Justin Anderson V. & Jeffrey A. Larsen yang berjudul *Extended Deterrence and Allied Assurance: Key Concepts and Current Challenges for U.S. Policy*. Jurnal ini membahas A.S dan kebijakan luar negerinya yang menyediakan dan selalu memberikan bantuan kepada negara sahabat sebagai kepentingan strategis negara, melakukan *extended deterrence* dan menjamin keamanan negara sahabat yang meminta bantuan di daerah-daerah yang vital dan strategis. Kebijakan AS dalam memberikan bantuan kepada negara sahabat memainkan peran yang penting dalam menjaga keamanan regional dan stabilitas secara global. Tulisan ini membahas konsep dasar dari *extended deterrence*, serta membahas peran AS dan halangan

yang dihadapinya dalam menjalankan kebijakan *extended deterrence*. Perbedaan tulisan ini dengan skripsi penulis adalah; dalam tulisan ini tidak dijelaskan AS yang men-*deter* Tiongkok dan Korea Utara (Pihak 2) serta memanfaatkan Jepang dan Korea Selatan (Pihak 3) sebagai studi kasus utama.

Sumber pustaka selanjutnya adalah sebuah tulisan oleh Charles Abeyawardena yang berjudul “*American Retrenchment and the Asia Balance of Power*” (2014). Tulisan ini dimulai dengan membahas kondisi keamanan dunia pasca Perang Dingin dan peran AS sebagai salah satu aktor penting yang ‘membentuk’ kondisi dunia. Pasca Perang Dingin Tiongkok yang muncul sebagai salah satu *rising power* dan menjadi salah satu ancaman di dunia dengan perkembangan militer dan ekonominya. Jurnal ini juga membahas mengenai ‘minggat’nya AS dari Timur Tengah dan beralih ke Asia untuk menciptakan kondisi *balance of power* dan *balance of threat* terhadap Tiongkok dan Korea Utara. Tulisan ini juga membahas hubungan AS dengan beberapa negara aliansi dan partnernya di Asia Pasifik. Menurut Charles keberadaan AS di Asia Pasifik tidak akan pernah ada tanpa adanya hubungan kerjasama yang baik dengan negara aliansi terutama kerjasama militer. Perbedaan tulisan ini dengan skripsi peneliti adalah; tulisan ini lebih berfokus kepada evolusi dan dinamika AS pasca Perang Dingin secara umum di Asia, termasuk Timur Tengah, dan tidak menjadikan dinamika di Asia Timur sebagai pembahasan utama. Tulisan ini bahkan tidak menyebut *term Pivot to Asia*, Charles hanya membahas perpindahan poros kebijakan luar negeri ke Asia secara umum dan dangkal. Charles juga membahas kerjasama AS hanya dengan beberapa negara partner seperti Jepang, Korea Selatan, Australia dan India dalam pembahasan utamanya.

Sumber pustaka selanjutnya adalah karya ilmiah yang berjudul “Dinamika Persenjataan Di Asia Timur Antara Cina dan Jepang” karya Mochamad Raga Saputra Pohan. Karya ilmiah ini ingin melihat bagaimana stabilitas sistem di Asia Timur setelah terjadinya persaingan antara Jepang dan Tiongkok melalui teori dinamika persenjataan oleh Barry Buzan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan perhitungan matematis untuk melihat perbandingan kekuatan antara Tiongkok dengan Jepang. Dimulai dengan mengangkat modernisasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok yang lebih mengarah pada pengembangan senjata ofensif – walaupun Tiongkok menyebutnya sebagai *program active defense* – membuat negara di kawasan, dalam hal ini Jepang merasa terancam, sehingga juga melakukan peningkatan kapabilitas militer. Dalam perhitungan kekuatan, Tiongkok jauh lebih unggul dibandingkan Jepang dengan perbandingan *force to force* 7:1, serta perbandingan senjata ofensif 2:1.³¹ Jika dilihat melalui *arms dynamics* yang dikemukakan oleh Barry Buzan perkembangan kapabilitas militer Tiongkok dikategorikan sebagai modernisasi militer, dengan pengembangan ke arah persenjataan ofensif. Sedangkan Jepang, dimana walaupun kewaspadaan terhadap Tiongkok sangat tinggi, akan tetapi perbandingan persenjataan yang dimiliki oleh Jepang masih kalah jauh dari Tiongkok, sehingga menempatkannya berada dalam kategori *arms maintenance*.³²

Perbedaan tersebut disebabkan pengaruh faktor domestik Tiongkok, khususnya dalam hal pertumbuhan ekonominya yang pesat sehingga turut mempengaruhi perkembangan militernya. Jika dilihat melalui teori stabilitas sistem

³¹ Mochamad Raga Saputra Pohan, *Dinamika Persenjataan Di Asia Timur Antara Cina dan Jepang*, (Tesis program Magister Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2010).

³² *Ibid.*

oleh Robert Gilpin, maka kondisi tersebut sedang berada dalam tahap *differential growth of power*, yang kemudian akan mengarah pada redistribusi kekuatan. Perubahan sebaran kekuatan tersebut, terlebih jika melihat perubahan kekuatan Tiongkok yang lebih mengarah pada kekuatan ofensif membawa kawasan Asia Timur kepada tahap *disequilibrium of system*. Situasi tersebut terjadi karena peluang akan perlombaan senjata akan meningkat dan akan membuka peluang lebih besar akan terjadinya perang. Perbedaan tulisan ini dengan skripsi penulis adalah, tulisan ini lebih berfokus kepada dinamika persenjataan antara Tiongkok dan Jepang, sedangkan skripsi ini juga membahas kondisi persenjataan Korea Utara dan Korea Selatan sebagai bagian dari dinamika keamanan yang ada di Asia Timur.

Selanjutnya adalah tulisan dari Frans-Paul Van Der Putten yang berjudul *The Sustainability of the US Military Presence in East Asia* (2011). Inti dari tulisan ini adalah membahas apakah keberadaan AS di Asia Timur dapat dipertahankan oleh AS sendiri melihat ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara yang terus meningkat dan kondisi dan dinamika AS dengan negara-negara aliansinya. Tulisan ini mengatakan secara jelas bahwa walau AS merupakan partner utama dalam militer, namun dalam ekonomi dan perdagangan, Tiongkok adalah pilihan pertama bagi negara-negara di Asia Pasifik. Namun itu malah menjadi keuntungan bagi AS, karena keamanan adalah faktor utama yang dikedepankan oleh sebuah negara.³³ Dan untuk mempertahankan posisinya ini, AS harus juga tetap meningkatkan postur pertahanan militernya dan unggul dari Tiongkok.

Lebih jauh tulisan ini juga membahas mengenai keberadaan dan kondisi pangkalan-pangkalan militer AS yang berada di Asia Pasifik khususnya di Asia

³³ Frans-Paul Van Der Putten, *The Sustainability of the US Military Presence in East Asia*, (2011)

Timur. Keberadaan pangkalan AS di kawasan merupakan suatu keharusan untuk menangkal pengaruh Tiongkok di kawasan dan melindungi negara-negara aliansi dan dapat mengambil tindakan secara cepat terhadap ancaman yang datang. Tulisan ini juga membahas ‘strategi andalan’ Tiongkok untuk menangkal keberadaan musuh di sekitar daerah perbatasan yaitu *Anti-Acces/Area Denial (A2/AD)* yang membuat AS tidak dapat bergerak bebas di kawasan. Kemudian, pembahasan mengenai *AirSea Battle* sebagai strategi balasan yang dilancarkan AS untuk menanggapi dan menangkal strategi A2/AD Tiongkok.³⁴ Perbedaan tulisan ini dengan skripsi penulis adalah; tulisan ini lebih membahas apakah keberadaan AS di Asia Timur akan dapat bertahan kedepannya dengan kondisi keamanan dan aliansi dengan negara partner sekarang ini, tidak lagi berfokus kepada apa itu *Pivot to Asia* atau bagaimana cara melancarkannya.

1.7. Teori dan Konsep

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori dan konsep yang digunakan untuk mempertajam penelitian ini. Teori dan konsep yang digunakan adalah:

1.7.1. Neorealisme

Neorealisme adalah sebuah perspektif dalam Hubungan Internasional yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979 melalui bukunya, “*Theory of International Politics*”. Menurut Waltz, dunia berada dalam hubungan-hubungan yang sistemik, dimana perilaku-perilaku dan kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh suatu sistem internasional yang terjadi saat itu, secara langsung atau tidak

³⁴ *Ibid*

langsung. Neorealisme dapat dikatakan sebagai pengembangan dari perspektif realis klasik E.H. Carr, Hans Morgenthau, dan Reinhold Niebuhr menjadi ilmu sosial yang teliti dan positivistik.³⁵

Neorealis tetap mempertahankan nilai realis yang mengatakan dunia adalah sebuah tempat yang bersifat antagonistik dan konflikual karena adanya struktur anarkis dalam hubungan internasional. Namun, yang membedakan realis dengan neorealis adalah aktor yang berperan dalam hubungan internasional tersebut. Menurut realisme klasik, aktor utama dalam hubungan internasional adalah negara bangsa (*nation-state*), berbeda dengan neorealisme, dimana menurut neorealisme aktor utama dalam hubungan internasional adalah sistem internasional itu sendiri, yang mempengaruhi negara-negara dalam bertindak.³⁶

Neorealisme juga disebut sebagai *realisme struktural*, karena pada dasarnya sifat manusia tidak ada hubungannya dengan mengapa negara ingin berkuasa, bahwa ini hanyalah sebuah strukturalisasi dalam sistem internasional lah yang akhirnya memaksa suatu negara untuk memperoleh kekuasaan itu sendiri. Realisme struktural mempunyai pendapat-pendapat atau asumsi-asumsi dasar yang lebih realistis dalam menyikapi sebuah fenomena. Bahwa tidak sepenuhnya benar terlalu pesimis mengenai sifat dasar manusia karena sebenarnya bukan itu saja yang menjadi fokus mereka untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan strukturalisasi dari sistem internasional itu sendiri ditambah lagi dengan tujuan utama setiap negara untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya agar bisa terus *survive*.³⁷

³⁵ George Sorensen and Robert Jackson, *Introduction to International Relations*, (New York: Oxford University Press Inc, 1999).

³⁶ *Ibid*

³⁷ John J. Mersheimer, 'Structural Realism' in: Tim Dunne, Miljka Kurki and Steve Smith [eds.] *International Relations Theories*, (Oxford: University Press, 2007) hal. 71-88.

Dalam penelitian ini, kondisi keamanan regional di Asia Pasifik, khususnya Asia Timur, sebagai sebuah dinamika sistem internasional telah membuat AS merasa kepentingannya akan terancam jika tidak melakukan suatu tindakan untuk merespon dinamika ancaman tersebut. Ekspansi militer Tiongkok dan ancaman nuklir Korea Utara merupakan ancaman utama yang dirasakan AS di kawasan ini, oleh karena itu AS harus lebih menanamkan keberadaannya disana serta bekerjasama dengan negara-negara aliansi dan melakukan *counter* terhadap Tiongkok dan Korea Utara.

1.7.2. Aliansi

Aliansi menurut Nye didefinisikan sebagai: *formal or informal arrangements between sovereign states, usually to ensure mutual security*.³⁸ Maksudnya, suatu hubungan yang dibuat berdasarkan kesepakatan tertentu, formal atau non-formal, dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan bersama. Adapun, aliansi menurut Griffiths dan Terry didefinisikan sebagai: *an agreement between two or more states to work together on mutual security issues*.³⁹ Menurut Griffiths dan Terry, aliansi yang berbentuk formal merupakan aliansi yang ditandai dengan penandatanganan sebuah *treaty* yang dilakukan secara terang-terangan (*publicly recognized*), sedangkan, aliansi informal tidak ditandai oleh kedua hal tersebut (*treaty* dan *publicly recognized*), bahkan menurutnya, dapat juga dicapai dengan hanya perjanjian secara rahasia kepala negaranya. Adapun alasan untuk beraliansi,

³⁸ Joseph Nye, *Understanding International Conflict, 7th Ed*, (New York: Pearson Longman, 2009)

³⁹ Martin Griffiths, Terry O'Callaghan, *International Relations the Key Concepts 2nd*, (London: Routledge, 2002)

menurut Nye, selain dibangun atas alasan militer, juga dibangun atas alasan nonmiliter, dua yang paling utama adalah ideologi dan ekonomi.⁴⁰

Aliansi merupakan salah satu konsep yang sangat berkaitan dengan konsep *balance of power*. Konsep *balance of power* sendiri, menurut Nye, secara singkat, membicarakan mengenai tiga hal, yaitu, pertama, mendeskripsikan mengenai distribusi *power* dalam sistem internasional; kedua, sebuah kebijakan (*policy*) untuk menyeimbangkan *foreign power* untuk mencegah satu negara memiliki *power* yang lebih dibandingkan dengan negara lain; ketiga, penyeimbangan *military power* yang terjadi di sistem multipolar di Eropa pada abad sembilan belas.⁴¹ Berkaitan dengan *balance of power*, aliansi diklaim, oleh kaum realis, mampu menjaga *balance of power*, dengannya, negara-negara tidak akan saling serang. Berbeda dengan klaim tersebut, aliansi dan *balance of power*, menurut Imanuel Kant (dalam Griffiths dan Terry) merupakan penyebab konflik antar negara.⁴²

Aliansi memiliki beberapa keuntungan. Untuk negara-negara kecil, aliansi membantu mereka mengurangi biaya untuk membangun pertahanan dan membantu dalam hal perekonomian, karena biasanya terjadi pula hubungan ekonomi antarnegara anggota aliansi baik berbentuk *trade*, *aid*, maupun *loan*. Untuk negara-negara besar, aliansi dapat memudahkan dalam membangun strategi pertahanan suatu negara terhadap musuh potensialnya - seperti halnya yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Uni Soviet, atau sebaliknya di masa perang dingin - dan juga dapat digunakan untuk menjaga hegemoni suatu negara terhadap negara yang beraliansi dengannya.⁴³

⁴⁰ Joseph Nye, *op.cit.*

⁴¹ *Ibid*, hal. 289

⁴² Griffiths dan Terry, *op.cit.* hal 2.

⁴³ *Ibid.*

Dalam penelitian ini, dalam menghadapi hegemoni yang muncul di Asia Timur yaitu Tiongkok dan Korea Utara, AS merasa harus lebih memperkuat hubungannya dengan negara-negara aliansi agar dapat melakukan *counter* untuk menciptakan kondisi *balance of power*. Letak geografis AS yang jauh dengan Asia Timur mengharuskan AS untuk memanfaatkan aliansinya dengan negara-negara aliansi tersebut agar dapat menanamkan pengaruhnya lebih besar di Asia Timur.

1.7.3. *Extended Deterrence*

Deterrence secara harfiah dapat diartikan sebagai sebuah ‘penangkisan’, penolakan atau pencegahan. Secara konseptual, *deterrence* merupakan sebuah strategi untuk mencegah terjadinya perang dengan cara ‘mengecilkan hati’ musuh yang mencoba menyerang.⁴⁴ Tujuan dari negara bertahan disini adalah untuk menunjukkan dan mengancam bahwa kerugian akan jauh melebihi keuntungan yang diharapkan. Negara pengancam harus menegaskan komitmennya untuk menghukum atau membalas dan memperlihatkan bahwa ia mampu melakukan itu untuk mendemonstrasikan *credibility of deterrence*.⁴⁵

Para ahli strategi mengidentifikasikan 4 macam *deterrence*.⁴⁶

1. *General Deterrence*, yaitu strategi jangka panjang yang dimaksudkan untuk “mengecilkan hati dengan pertimbangan yang serius atas segala bentuk ancaman kepentingan negara lain. *General deterrence* berjalan setiap waktu.
2. *Immediate Deterrence*, adalah suatu tanggapan *deterrence* yang dilakukan dengan ‘segera’ atau ‘darurat’. Terjadi ketika musuh telah siap akan

⁴⁴ James Dougherty & Robert Manzi, *Contending Theories of International Relations; A Comprehensive Study*, 4th edition, (New York, 1996).

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Heri Alfian, *Deterrence*, (Jember: Universitas Jember, 2010).

melakukan serangan, tetapi *immediate deterrence* mungkin masih dapat dilakukan untuk meyakinkan musuh untuk menghentikan dan tidak melakukan serangan.

3. *Primary Deterrence*, dimaksudkan untuk meminta negara lain untuk tidak menyerang suatu negara, dan;

4. *Extended Deterrence* adalah memprovokasi suatu negara musuh untuk tidak menyerang suatu negara yang merupakan partner dari negara provokator.

Extended deterrence biasanya dilakukan dengan cara beraliansi dengan negara lain (partner) untuk menanamkan pengaruh disekitar negara partner.

Extended deterrence sebagai sebuah konsep strategis melibatkan suatu negara yang menggunakan segala kekuatan negara, termasuk penggunaan perangkat militer, untuk mencegah (*to deter*) pihak asing mengancam atau menyerang pihak ketiga. Pihak ketiga ini biasanya adalah negara aliansi atau partner; namun, untuk melindungi suatu kawasan atau kepentingan.⁴⁷ *Extended deterrence* merupakan sebuah strategi suatu negara, yaitu dengan menanamkan pengaruh disuatu kawasan dengan bekerjasama dan memberikan perlindungan kepada suatu negara di kawasan tersebut yang dijadikan mitra aliansi, serta membangun dan mendorong kekuatan militer negara aliansi, sehingga dapat memiliki akses ke kawasan tersebut. Kekuatan dibangun untuk melindungi pihak ketiga (negara partner) dari ancaman, sekaligus kekuatan militer yang dibangun digunakan sebagai alat provokasi pada pihak lawan.⁴⁸

⁴⁷ Justin Anderson V & Jeffrey A. Larsen, *Extended Deterrence and Allied Assurance: Key Concepts and Current Challenges for U.S. Policy*, (Colorado: USAF Institute for National Security Studies, September 2013), hal. 5

⁴⁸ *Ibid*

Secara umum, *extended deterrence* bisa digambarkan sebagai Pihak 1 yang mencoba untuk menghalangi (*to deter*) Pihak 2 untuk mengintimidasi, memaksa, atau menyerang Pihak 3.⁴⁹ *Extended deterrence* dilakukan memang adalah untuk menjamin keamanan dan melindungi Pihak 3, namun fokus dan target sebenarnya dari melakukan *extended deterrence* adalah untuk memprovokasi Pihak 2. Bagi Pihak 1, *extended deterrence* berpusat pada pertanyaan berikut: apakah yang menghalangi (*deter*) Pihak 2 dari mengintimidasi dan menyerang Pihak 3? Intinya, fokus utama dari *extended deterrence* adalah ancaman potensial dari musuh dan bukan Pihak 3 yang Pihak 1 lindungi dari ancaman dan serangan Pihak 2.⁵⁰

Dengan ini disimpulkan bahwa *extended deterrence* sebagai cara atau *tool* bagi AS untuk melancarkan kebijakan *Pivot to Asia*-nya di kawasan Asia Timur, karena kondisi geografis negara asal nya yang jauh dengan kawasan dan telah terjalinnya hubungan aliansi dengan Jepang dan Korea Selatan sebagai negara aliansi utama.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Batasan Masalah

1. *Pivot to Asia* merupakan strategi AS yang berfokus kepada kawasan Asia Pasifik secara luas, namun peneliti membatasi analisa hanya pada kepentingan AS di kawasan Asia Timur.
2. *Pivot to Asia* baru dicanangkan pada tahun 2011, dan masih terus berlanjut hingga sekarang (2016). Sehingga penelitian ini penulis batasi dari tahun 2011 hingga tahun 2016.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

3. *Pivot to Asia* memiliki tujuan ekonomi, militer, politik serta diplomasi didalamnya, namun peneliti hanya membatasi pembahasan hanya pada kepentingan militer dan membahas kepentingan pada bidang lain hanya sekilas saja.

1.8.2. Unit dan Tingkat Analisa

Sebelum menentukan tingkat analisa dalam suatu penelitian terlebih dahulu perlu dilakukan penetapan terhadap unit analisa dan unit ekplanasi. Unit analisa adalah objek yang perilakunya hendak kita teliti (variabel dependen). Unit ekplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan (variabel independen).⁵¹

Unit analisa yang akan peneliti teliti adalah 'AS'. Sedangkan, unit eksplanasi pada penelitian ini adalah 'dinamika keamanan di Asia Timur', serta tingkat analisa nya adalah sistem internasional.

1.8.3. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah pendekatan yang berguna untuk menjelaskan fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Penelitian di lakukan untuk memahami dan menjelaskan fenomena-fenomena yang telah berjalan dan sedang berjalan. Pentingnya penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan data-data yang berbentuk lisan dan tulisan, peneliti dapat memahami lebih mendalam tentang fenomena-fenomena yang berhubungan dengan fokus

⁵¹ Mochtar Mas'oeid, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 35-39

masalah yang diteliti.⁵² Sedangkan tujuan penelitian kualitatif itu sendiri adalah untuk memahami fenomena sosial.⁵³ Alasan digunakannya pendekatan kualitatif pada penelitian ini, dikarenakan pilihan objek yang diteliti dan konsep-konsep yang digunakan oleh penulis yang berusaha melihat bagaimana kejahatan lintas batas dan pengaruhnya terhadap keamanan manusia.

Untuk tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu sebuah tipe penelitian kualitatif yang menggambarkan secara deskriptif fenomena yang diteliti. Peshkin menyatakan bahwa suatu kajian kualitatif yang baik dapat mendeskripsikan atau menerangkan, membuat interpretasi, menilai, mengesahkan dan melakukan perpaduan atau pengintegrasian ilmu tentang dunia dan apa yang berlaku di dalamnya.⁵⁴ Tipe penelitian ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang penulis teliti, serta dapat menghubungkannya konsep yang dipakai.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai data utama, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi. Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.⁵⁵ Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menyeleksi dokumen-dokumen, arsip-arsip serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, jurnal atau artikel yang berkaitan

⁵² Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008) hal. 186

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

dengan penelitian ini. Bahan-bahan tersebut didapat dari ruang pustaka atau pusat dokumentasi lain.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, analisis data kualitatif adalah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Interpretasi atas data-data yang termasuk kedalam data-data objektif yang relevan untuk menambah informasi atau bisa menjadi petunjuk untuk menjelaskan bagian-bagian dan hubungan-hubungan antar bagian yang terdapat dalam model analisa. Penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang digambarkan berupa fakta-fakta, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.⁵⁶

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini akan terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB 1, adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian;

BAB 2, dalam bab ini penulis akan memulai dengan membahas terlebih dahulu dinamika ancaman di Asia Timur sebagai faktor yang mendorong AS untuk melakukan *Pivot to Asia*.

⁵⁶ Yanuar Ikbar. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), hal. 103

BAB 3, adalah bab yan menjelaskan apa itu *Pivot to Asia* secara luas dan bagaimana strategi AS dalam mewujudkannya.

BAB 4, adalah bab yang menjelaskan bagaimana strategi AS dalam melakukan *Pivot to Asia* sesuai dengan tujuan penulis membuat penelitian ini.

BAB 5, Kesimpulan dan Saran

